



**PRA - EVALUASI**  
**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019**  
menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  
&  
menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)  
di lingkungan Kementerian Perhubungan



Mekanisme Penilaian & Pengawasan Internal  
**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU PREDIKAT WBK DAN WBBM**



**INSPEKTUR JENDERAL**  
Kementerian Perhubungan  
**Dr. Wahyu S. Utomo**

Selasa, 6 Agustus 2019



# APRESIASI & PEANUGERAHAN



**KEBERHASILAN** pembangunan Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM diberikan bertepatan dengan peringatan

**HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA**

setiap tanggal



Catatan:

Tahun lalu penghargaan diberikan oleh **Pimpinan Tinggi Negara, Menteri Pan RB** dan dihadiri oleh **Tim Penilai Nasional (TPN)** lainnya dari KPK, Ombudsman dan BPS



# KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN MENUJU WBK

## 1 Tim Survei : BPS

M-I Agustus s.d. M-III September

### Indikator Hasil (3 Area)

1. Syarat minimum **92,5%**, untuk hasil survei Persepsi Pencegahan Anti Korupsi *(sedang berlangsung)*
1. Syarat minimum **75%** untuk hasil survei Persepsi Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat *(sedang berlangsung)*
2. Syarat minimum **100%** bahwa UPT nominasi telah menuntaskan/menindaklanjuti seluruh hasil audit ITJEN dan BPK *(telah berlangsung)*

## 2 Tim Penilai : KemenPAN RB

M-IV September sd. M-1 Nopember

- Evaluasi dilakukan kepada UPT nominasi yang telah lulus survei BPS
- Syarat minimum nilai **60%** pada Lembar Kerja Evaluasi Tim Penilai

### Indikator Pengungkit (6 Area)

#### 1. MANAJEMEN PERUBAHAN

- **Tujuan** : mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja

#### 2. PENATAAN TATA LAKSANA

- **Tujuan** : meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur

#### 3. PENATAAN MANAJEMEN SDM

- **Tujuan** : meningkatkan profesionalisme SDM dan pengelolaan SDM aparatur

#### 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

- **Tujuan** : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja

#### 5. PENGUATAN PENGAWASAN

- **Tujuan** : meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

#### 6. PENGUATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

- **Tujuan** : meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat

# MEKANISME PENILAIAN

## 1. INTERNAL



### 1

### Unit Kerja Eselon I

Februari-Maret 2019

Mengusulkan secara mandiri unit kerja mandirinya di level Eselon I/II/III yang di anggap unggul dalam **membangun Reformasi Birokrasi** khususnya terkait Pencegahan Budaya Anti Korupsi dan Kualitas Pelayanan yang disampaikan melalui Lembar Kerja Evaluasi dari Inspektorat Jenderal



### 2

### Inspektorat Jenderal

April-Mei 2019

Melakukan **evaluasi kelayakan** terhadap:

1. Keterkaitan antara data dukung dengan 6 Indikator Pengungkit
2. Hasil survey mandiri terkait pencegahan korupsi dan kualitas layanan
3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen & BPK-RI



# MEKANISME PENILAIAN

## 2. EKTERNAL...(1)



1

### Kementerian PANRB

Juni-Juli 2019

Melakukan *desk evaluation* terkait data-data nominator yang telah disampaikan oleh Inspektorat Jenderal dan Informasi awal Integritas Organisasi dari KPK serta Informasi awal kualitas peyanan dari Omburdsman

2



### Badan Pusat Statistik

M-1 Agustus – M-3 September 2019

Menerima usulan nominator yang lulus desk evaluation dari Kemen PAN RB untuk *dilakukan survey* terkait:

1. Persepsi Budaya Pencegahan Korupsi
2. Persepsi Kualitas Pelayanan

# MEKANISME PENILAIAN

## 2. EKTERNAL...(2)



3

### Kementerian PANRB

M-IV September sd. M-1 Nopember 2019

Para Nominator yang **lulus survey BPS** akan dievaluasi oleh Kemen PANRB melalui:

1. Paparan langsung Kepala Kantor
2. Paparan yang dianggap memenuhi pembangunan ZI akan dilakukan uji petik dokumennya terhadap 6 Area Indikator Pengungkit

4



M-IV Nopember 2019

Tim Penilai Nasional yang terdiri dari Kemen PANRB, KPK, dan Ombudman Badan Pusat Statistik melakukan **RAPAT PLENO** terhadap nominasi-nominasi yang diusulkan mendapat predikat WBK dan WBBM



# STRATEGI MENGOPTIMALKAN DESK EVALUATION

## TIM PENILAI KEMENPANRB



- 1 Menuntaskan** seluruh hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
- 2 Menindaklanjuti** seluruh hasil pengaduan masyarakat
- 3 Menviralkan** aktivitas pembangunan Zona Integritas di Media Sosial dan Elektronik

# STRATEGI MENGOPTIMALKAN SURVEY BPS



1

Menjadikan hari **Super Integritas** dan **Super Pelayanan** diseluruh area kantor (menyesuaikan jadwal Survey Tim BPS)

2

**Mengkampanyekan terus** Pembangunan dan Aksi dalam membangun ZI kepada para Pegawai dan Stakeholder

3

Sering melakukan **survey secara mandiri** kepada Stakeholder terkait persepsi Anti Korupsi dan persepsi Kualitas Pelayanan



# STRATEGI MENGOPTIMALKAN INDIKATOR PENGUNGKIT

Tim Penilai Kemen PANRB

## 1. PAPARAN KEPALA KANTOR



Pimpinan dapat memaparkan dengan jelas serta menguasai **Strategi-Strategi** pembangunan ZI dan dampaknya

## 2. PENILAIAN ON THE SPOT



- Pimpinan dan Seluruh Manajemen hadir
- PIC Indikator Pengungkit menguasai saat diwawancara dengan Tim Penilai
  - Bukti dukung valid sesuai isian LKE
- Sarana, Perangkat, dan Inovasi pelayanan dioptimalkan
  - Budaya Hospitality seluruh area kantor



TERIMA KASIH

# INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Gedung Karya Lantai 18 - 19  
Gedung Karsa Lantai 6  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110  
Telp/Fax 021 350 7655  
"www.dephub.go.id / http://itjen.dephub.go.id"



Wbs system: [simadu.dephub.go.id](http://simadu.dephub.go.id)



Itjenkemenhub\_151



Itjenkemenhub\_151



@Itjenkemenhub\_151



Itjen 151





# **MEMBANGUN 6 AREA**

## **INDIKATOR PENGUNGKIT**



# 1. MEMBANGUN MANAJEMEN PERUBAHAN

## KOMITMEN

SK TIM

Manajemen PIC per elemen

Sebagian besar pegawai terlibat

Rencana Kerja ZI (Road Map)

Pencanangan

Media-media mengkampanyekan ZI

## BUDAYA KERJA

Ditetapkannya agen perubahan (individu/kelompok)

Agen perubahan mempunyai program

Nilai-nilai organisasi (dilegalkan, internalisasi dan eksternalisasi)

## MONITORING RENCANA KERJA ZI

Rencana Aksi

Evaluasi dan Tindak Lanjut

## 2. MEMBANGUN PENATAAN TATA LAKSANA

### Proses Bisnis & SOP (PM 50/2017 & PM 82/2017)

- Layanan unggulan
- Evaluasi dan Pemuktakhiran
- Sertifikasi prosedur mutu (layanan)

### Membudayakan E-Government

- Jenis-jenis operasionalisasi organisasi yang menggunakan IT
- Jenis laporan kinerja yang menggunakan IT (pegawai dan organisasi)
- Monitoring TIK (pengembangan) /Blueprint



### Keterbukaan Informasi Publik

- Sarpras PPID
- Humas
- Pengaduan (Sarana & Media)



### 3. MEMBANGUN PENATAAN Manajemen SDM

PETA JABATAN

ANJAB & ABK

MEKANISME REWARD  
DAN PUNISH

POLA PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI

PETA GAP KOMPETENSI

POLA REKRUITMEN DAN  
MUTASI

MONITORING DAN  
EVALUASI SDM

MEKANISME  
PENGUKURAN KINERJA

SISTEM INFORMASI SDM  
YANG DIGUNAKAN

PENGUKURAN KINERJA  
PEGAWAI

*CODE OF CONDUCT*  
(SOSIALISASI DAN  
IMPLEMENTASINYA)  
PM 99/2011

# 4. MEMBANGUN PENGUATAN AKUNTABILITAS

## KETERLIBATAN PIMPINAN

- Perjanjian Kinerja
- Upaya meningkatkan kompetensi bagi pegawai yang menyusun dokumen perencanaan (top down)

## DOKUMEN PERENCANAAN

- Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, LAKIP /Laporan Tahunan
- tindak lanjut hasil LAKIP

## PEMAHAMAN DOKUMEN PERENCANAAN

- Metode yang digunakan
- Berorientasi outcome bukan hasil
- Konsep **S M A R T**
- Sampling SKP dari staf sd pimpinan puncak kemudian menjelaskan linearitas kontribusi semua orang dengan tujuan organisasi (buttom up)

# 5. MEMBANGUN PENGUATAN PENGAWASAN

## GRATIFIKASI

- Media-media sosialiasi
- Matrik Identifikasi kegiatan, aktifitas, faktor dan kegiatan menanggulangi nya
- Pelaporannya (periodic walaupun nihil)

## SPIP (PENYELENGGARAAN & MATURITAS)

- **Soft Control:** Rencana Tindak Perbaikan (lingkungan pengendalian)
- **Hard Control :** Rencana Tindak Pengendalian (Analisa risiko) terdiri dari Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Kegiatan, Infokom dan Pemantauan

## PENGADUAN MASYARAKAT

- Sarana
- Informasi proses penanganan pengaduan
- Tindak lanjut

## WISTHLE BLOWING SYSTEM

- Mekanisme publikasi
- Sarana di web internal

## CONFLICT OF INTEREST (BENTURAN KEPENTINGAN) PM 61/2016

- Media publikasi
- Identifikasi potensi-potensi (bentuk, jenis dan sumber) benturan kepentingan)
- Surat Pernyataan Benturan Kepentingan
- Laporan secara berkala walaupun nihil

# 6. MEMBANGUN KUALITAS PELAYANAN PRIMA

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Kebijakan

Sosialisasi

Maklumat



## BUDAYA PELAYANAN PRIMA

Slogan/Moto

Kemudahan Akses



## PENILAIAN KEPUASAN

Periodikal survey

Publikasi hasil survey

Tindak lanjut hasil survey

